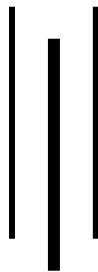




**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**



TAHUN ANGGARAN 2016

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KOTA BINJAI**

**PROVINSI SUMATERA UTARA
JL. M.T. HARYONO NO. 8 BINJAI**

2017

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, akhirnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai ini dapat diselesaikan.

Dalam proses penyusunannya senantiasa berupaya mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih atas bimbingan dan perhatian yang telah diberikan terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak H. M. IDAHAM, selaku Walikota Binjai
2. Bapak H. TIMBAS TARIGAN, selaku Wakil Walikota Binjai
3. Bapak H. ELYUZAR SIREGAR, selaku Sekretaris Daerah Kota Binjai
4. Kepada semua pihak, baik tim penyusun laporan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai maupun rekan/teman sejawat di lingkungan Pemerintahan Kota Binjai yang telah memberikan informasi, saran, kritik dan pendapat yang bersifat membangun guna menyempurnakan laporan ini.

Semoga Allah Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dengan harapan segala upaya yang dilaksanakan menjadi bukti nyata pengabdian kita kepada masyarakat

Akhirnya kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai khususnya dan Pemerintahan Kota Binjai pada umumnya.

Wassalamu'alaikum WR.Wb.

Binjai, Januari 2017
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
KOTA BINJAI

Ir. ELVI KRISTINA SRI ULINA, M.Sc
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641001 199003 2 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai Tahun 2016 menggambarkan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja dinas yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 7 (enam) sasaran, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 85 – 100 yang termasuk dalam interpretasi memuaskan. Dalam Tahun Anggaran 2016 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Binjai sebesar Rp. 151.538.821.159,-, sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 141.608.623.283,- atau dengan serapan APBD mencapai 93,45% dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai Kondisi anggaran Silpa Rp. 9.930.197.867,-.

Dalam Tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum menetapkan sebanyak 6(enam) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja sesuai dengan rencana kerja dan dokumen perjanjian kinerja Tahun 2015 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 75 atau interpretasi baik

Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 116,45 atau interpretasi memuaskan

Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 106.79 atau interpretasi memuaskan

Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 152,41 atau interpretasi memuaskan

Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 87,50 atau interpretasi baik

Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 85,71 atau interpretasi baik

Sasaran 7 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 70,59 atau interpretasi cukup baik

Dari hasil pengukuran kinerja dan evaluasi secara keseluruhan, terdapat kinerja yang perlu ditingkatkan untuk Tahun 2017 antara lain :

1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan perlu ditingkat baik kuantitas maupun kualitas;
2. Pembangunan dan pemeliharaan saluran Drainase/gorong-gorong;
3. Pembangunan dan pemeliharaan Lining,bronjong dan saluran primer
4. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan air limbah
5. Meningkatkan sosialisasi dan partisipasi masyarakat
6. Meningkatkan kerjasama lembaga yang kompeten.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. GAMBARAN UMUM SKPD	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP 2016	3
1.3. SISTEMATIKA LAKIP 2016	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
1.1. PERENCANAAN STRATEGIS	5
2.2. PERJANJIAN KINERJA 2016	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	10
3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	11
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN	14
BAB IV PENUTUP	
4.1. KESIMPULAN	16
4.2. REKOMENDASI	17
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM SKPD

Perkembangan sosial politik negara-negara di dunia saat ini telah memunculkan konsep baru mengenai pemerintahan dan bagaimana peran pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Konsep ini memberi pemahaman baru pada cara pandang bagaimana sebaiknya peran pemerintah dalam mengatur kehidupan masyarakat dimana pemerintah berperan sebagai pengelola yang menjalankan fungsi manajemen/tata kelola secara baik dan profesional (*good governance*) bukan sekedar pengatur dan pemberi perintah. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya perubahan cara interaksi masyarakat di dunia seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi yang semakin memperkecil jarak dan sekat-sekat antar masyarakat dunia.. Penerapan konsep ini menuntut adanya transparansi sebagai pondasi bagi berdirinya kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat akan mempermudah dan mempercepat keberhasilan semua program yang dijalankan pemerintah karena pada tingkatan partisipasi masyarakat yang aktif inilah akan menghasilkan tingkat akseptabilitas yang tinggi di masyarakat. Penerapan transparansi oleh pemerintah dalam menjalankan program-program pembangunan dapat dilihat dari sejauhmana capaian yang dihasilkan antara perencanaan dan hasil capaian pembangunan. Capaian tersebut harus dapat terukur (akuntabel) dan menjadi indikasi keberhasilan program-program pembangunan yang dilakukan pemerintah dan juga sebagai kontrol apakah program pembangunan yang dijalankan sesuai dan selaras dengan visi pembangunan yang bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pengaruh Globalisasi dan perkembangan motivasi masyarakat untuk berperan dalam pembangunan terlebih lagi di era Reformasi serta kebebasan informasi saat ini menjadikan peran Dinas Pekerjaan Umum sebagai bagian unsur teknis dari Pemerintahan Kota Binjai sedemikian penting dan strategis dalam mewujudkan *Good Governance* tersebut selaras dengan TAP MPR No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang – undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Sebagai tindak lanjut Operasional Pelaksanaan TAP MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang - Undang No.28 Tahun 1999 tersebut terbitlah Inpres No.7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai Penyelenggara Pemerintah Negara harus dapat mempertanggung jawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan/Pengelolaan Sumber Daya dan Kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pedoman Dasar Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Inpres No.7 Tahun 1999 tersebut dan Perda No. 18 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Pemerintah Kota Binjai serta Keputusan Walikota Binjai No.188.342-509 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai, bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai berada sebagai unsur Staf dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Binjai yang bekerja secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan, turut bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Gedung/Bangunan, Pengairan/Drainase.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai dalam menjalankan peranannya sebagai unsur Staf Walikota Binjai, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pekerjaan Umum.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat ;
- c. Bidang Bina Program;
- d. Bidang Bina Marga;
- e. Bidang Cipta karya
- f. Bidang Pengairan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dan masing–masing Bagian dan Bidang dibantu oleh Sub bagian dan Seksi – seksi.


(Struktur Organisasi terlampir).

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan perumusan dan kebijakan Pemerintah Daerah (Walikota) di bidang Pekerjaan Umum;
- b. Menyusun program kegiatan operasional pelaksanaan pembangunan pengelolaan, peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum;
- c. Menetapkan dan menyelenggarakan kegiatan dibidang Pekerjaan Umum;
- d. Melaksanakan Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan Umum;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai didukung oleh Sumber Daya Manusia (Pegawai) sebanyak 65 orang ditambah dengan 44 orang tenaga honorer.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP 2016

 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem LAKIP bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai adalah perwujudan dari *implementasi* sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kota Binjai. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem LAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai.

Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1. Maksud

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai dimaksudkan untuk mengevaluasi Akuntabilitas dan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan situasi dan kondisi yang dihadapi dalam setiap tahun anggaran.

2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memberikan dasar bagi Dinas Pekerjaan Umum dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan sekaligus dapat memberikan pemikiran yang konstruktif bagi Pimpinan dan masyarakat atas pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai Tahun 2016 mencakup hal-hal berikut ini :

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2016 sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2016. Laporan capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama 2016.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2016 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai bagi upaya – upaya perbaikan kinerja di masa datang.

Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja pemerintah Kota Binjai dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.3. SISTEMATIKA LAKIP 2016

ada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai selama tahun 2016. Capaian kinerja (*performance results*) 2016 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai tahun 2016 dapat diilustrasikan. Uraian singkat masing – masing sebagai berikut:

- Bab I – Pendahuluan

: Menjelaskan secara ringkas profil Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP 2016 ini.
- Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

: Menjelaskan Renstra Dinas PU Kota Binjai untuk periode 2016 - 2021 dan Perjanjian Kinerja untuk tahun 2016.
- Bab III – Akuntabilitas Kinerja

: Menjelaskan pencapaian kinerja menyeluruh dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai selama tahun 2016 sebagai hasil implementasi keseluruhan program dan kegiatan dalam periode tersebut.
- Bab IV – Penutup

: Menjelaskan kesimpulan seluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai tahun 2016 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai Tahun Anggaran 2016 ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko dengan memanfaatkan sebanyak – banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikan upaya pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik (*Feed back*).

Adapun Rencana Strategis (Renstra) Instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya di lingkungan instansi pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap dalam tatanan strategis manajemen nasional.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai disusun dalam pengertian Rencana Strategis instansi pemerintah pada lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai, dengan menguraikan secara jelas mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Strategis Pencapaian serta Kegiatan akan yang dilakukan.

1. Visi

Visi merupakan cara pandang yang memberi gambaran di masa depan sebagai tujuan yang akan dicapai. Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai sebagai bagian dari unsur Pelaksana Pemerintah Kota Binjai dalam merumuskan visinya harus selaras dengan visi Kota Binjai itu sendiri, sehingga diharapkan dapat mendorong Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai untuk mempersiapkan diri agar tetap konsisten menjalankan fungsinya dengan tata kelola yang baik (*good governance*), mengupayakan perubahan ke arah perbaikan dalam jangka panjang terutama dalam perbaikan infrastruktur perkotaan sehingga terwujud Kota Idaman

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan Pemerintah Kota Binjai maka rumusan Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai Tahun 2016-2021 adalah : **" Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Menuju Binjai yang Sejahtera "**.

Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur bermakna pembangunan sistem fisik yang menyediakan transportasi, bangunan-bangunan gedung, dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Berwawasan Lingkungan

Berwawasan Lingkungan bermakna menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.

Visi diatas menggambarkan bahwa pada tahun 2016-2021 pembangunan infrastruktur Kota Binjai dilaksanakan untuk peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat di Kota Binjai dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan yang layak huni (smart living), infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat yang produktif (smart mobility) sesuai standar pelayanan minimal dan Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Binjai.

2. Misi

Pencapaian tujuan yang dirumuskan dalam Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai tersebut memerlukan perumusan sistematis bagaimana usaha organisasi mencapainya. Perumusan usaha dalam mencapai tujuan sesuai dengan visi yang ditetapkan tertuang dalam misi-misi yang merupakan hal-hal dan upaya yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil. Diharapkan Misi dapat menjadi panduan kerja bagi seluruh pegawai dan pihak – pihak lain yang berkepentingan untuk mengenal, mengetahui perannya dalam menjalankan program – program kegiatan.

Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai, adalah :

3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah
4. Meningkatkan Ketersediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Masyarakat
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan di capai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu, yaitu dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan karekteristik tujuan dapat diartikan, sebagai berikut :

- Idialistik, yaitu mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil.
- Jangkauan kedepan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana ditetapkan oleh suatu organisasi.
- Abstrak, yaitu belum dapat dilihat secara kuantitatif, karena pencapaiannya berlangsung secara berkesinambungan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur dan dapat dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Fokus utama sasaran adalah tindakan alokasi, distribusi dan pemanfaatan sumber daya yang mengarah pada hasil nyata. Adapun tujuan dan sasaran pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai dalam lima tahun kedepan adalah seperti tercantum dalam table berikut:

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah	1.Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan danjembatan di Kota Binjai sehingga masuk dalam kategori kondisi baik.	1.Membangun dan meningkatkan kwalitas jalan dengan Hotmix. 2.Meningkatkan kwalitas jalan dengan Cor Beton. 3.Membangun Jembatan 4.Memelihara Jalan dan Jembatan berkala di Kota Binjai	
Meningkatkan Ketersediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Masyarakat	1.Menyediakan sarana dan prasarana air bersih di Kota Binjai 2.Menyediakan pengelolaan Air Limbah/Sanitasi untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Kota Binjai	1.Mengadakan dan Memasang Pipa Distribusi Air Bersih. 2.Membangun Instalasi Pengolahan Air(IPA)/Water Treatment Plan(WTP) 3.Membangun IPAL komunal	
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman	1.Meningkatkan kuantitas dan kualitas Jaringan Saluran Drainase konsevasi sungai dan sumber daya air lainnya di Kota Binjai	1.Membangun Saluran Drainase 2.Membangun Linning dan Bronjong Sungai 3.Membangun Saluran Primer 4.Membangun Saluran Irigasi	

4 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selain

itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka dan/atau menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penetapan Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut:

1. Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD
2. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD
3. Identifikasi indikator dan target kinerja SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut :

2.2. PERJANJIAN KINERJA 2016

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan sebagai wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna dalam menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai Tahun 2016 mengacu pada dokumen renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016. Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dengan uraian sebagai berikut:

TABEL 2.2. Perjanjian Kinerja 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasaranan perkotaan di bidang : Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan	Merencanakan program dan kegiatan infrastruktur di kota Binjai	Program	8
2	Meningkatnya Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pengaspalan jalan dengan Hotmix	m	52.747
		Pemeliharaan Jalan dengan rutin (swakelola)	m	3.000
		Pemeliharaan jembatan dengan rutin (swakelola)	Unit	10
3	Meningkatnya Jaringan Saluran Drainase di Kota Binjai	Meningkatnya Jaringan Drainase di Kota Binjai	m	27.915
		Panjang Saluran Drainase/gorong-gorong yang direhabilitasi dan dipelihara dengan rutin (swakelola)	m	4.000
4	Meningkatnya Fungsi Sungai dengan Pembangunan Linning dan Bronjong	Pembangunan Linning dan Bronjong	m	1.500
		Turap/talud/bronjong/saluran primer		

		yang direhabilitasi dan dipelihara		
5	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Tentang Ke-Pu-an	Kegiatan	3
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana Kantor	Kegiatan	7
6	Meningkatnya sarana aparatur	Bangunan Gedung Kantor yang di bangun	Unit	14
		Bangunan dan Gedung Kantor yang di rehabilitasi dan dipelihara dengan rutin (swakelola)	Unit	10
7	Meningkatkan Pelayanan Publik di bidang infrastruktur	Pembangunan sarana Pelayanan Publik	Unit	17

Untuk mewujudkan kinerja diatas di buat beberapa program dengan anggaran yang telah di tetapkan, seperti terlihat pada Tabel 2.3. berikut ini :

TABEL 2.3. Program dan Alokasi Anggaran T.A. 2016

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	950.934.100,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	34.846.281.000,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	99.856.000,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.000.000,00
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	251.642.850,00
6	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	51.987.125.000,00
7	Program Pembangunan saluran Drainase/ Gorong-gorong	34.787.683.000,00
8	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	13.169.353.400,00
9	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	2.827.805.250,00
10	Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Talud/Bronjong	2.613.166.000,00
11	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	17.476.020.000,00
11	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase dan Gedung	4.857.133.200,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2016.

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Berikut ini adalah tabel Capaian Kinerja tahun 2016 yang di sesuaikan dengan perjanjian kinerja :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasaranan perkotaan di bidang : Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan	Merencanakan program dan kegiatan infrastruktur di kota Binjai	Program	8	6	75
2	Meningkatnya Jumlah Prasarana Jalan yang diaspal dengan Lapen, Hotmix dan Jembatan	Pengaspalan jalan dengan Hotmix	m	52.747	43.437,6	82,35
		Pemeliharaan jalan dengan rutin (swakelola)	m	3.000	5.000	167
		Pemeliharaan Jembatan dengan rutin (swakelola)	Unit	10	10	100
3	Meningkatnya Jaringan Saluran Drainase di Kota Binjai	Meningkatnya Jaringan Drainase di Kota Binjai	m	27.915	29.809,4	106,79
		Panjang Saluran Drainase/gorong-gorong yang direhabilitasi dan dipelihara dengan rutin (swakelola)	m	4.000	11.157	278,92
4	Meningkatnya Fungsi Sungai dengan Pembangunan Lining dan Bronjong	Pembangunan Lining dan Bronjong	m	1500	2286,2	152,41
		Turap/talud/bronjong/saluran primer yang direhabilitasi dan	m	6.532	5.232	80,09

		dipelihara				
5	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Tentang Ke-Pu-an	Kegiatan	2	0	0
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana Kantor	Kegiatan	8	7	87,50
6	Meningkatnya sarana aparatur	Bangunan Gedung Kantor yang di bangun	Unit	14	12	85,71
		Bangunan dan Gedung Kantor yang di rehabilitasi dan dipelihara dengan rutin (swakelola)	Unit	10	17	170
7	Meningkatkan Pelayanan Publik di bidang infrastruktur	Pembangunan sarana Pelayanan Publik	Unit	17	12	70.59

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi Kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memperoleh informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah Kota Binjai.

- a. *Sasaran : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasaranan perkotaan di bidang : Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan*

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
Merencanakan program dan kegiatan infrastruktur di kota Binjai	Program	8	6	75

Pada Indikator kinerja Merencanakan program kegiatan infrastruktur di kota binjai, hasilnya berupa Detail Enginering Design (DED) untuk rencana bangunan publik, pembangunan jalan dan jembatan serta pengairan. Pada kegiatan DED rehabilitasi pasar tavip dan DED pembangunan titi gantung kelurahan limau sundai tidak terlaksana karena keterbatasan waktu pelaksanaan. Ketersediaan DED untuk perencanaan pembangunan infarastruktur sebagai indikasi bahwa program pembangunan telah terencananya dengan baik dengan capaian kinerja mencapai 75%.

b. Sasaran: Meningkatnya Jumlah Prasarana Jalan yang diaspal dengan Lapen,Hotmix dan Jembatan

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
Pengaspalan jalan dengan Hotmix	m	52.747	43.437,66	82.35
Pemeliharaan rutin jalan (swakelola)	m	3.000	5.000	167
Pemeliharaan Jembatan dengan rutin(swakelola)	Unit	10	10	100

Pada indikator Kinerja “pengaspalan jalan dengan hotmix persentase capaian sebesar 82,35% atau sebesar 43.437,66 m panjang jalan yang telah diaspal dengan hotmix maka hasil ini menunjukkan tidak tercapainya target sebesar 52.747 m. Pada Indikataor Pemeliharaan Jalan rutin (swakelola) terjadi peningkatan target karena adanya penambahan dana di anggaran perubahan (P.APBD 2016) kota Binjai.

c. Sasaran : Meningkatnya Jaringan Saluran Drainase di Kota Binjai

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
Meningkatnya Jaringan Drainase di Kota Binjai	m	27.915	29.809,47	106,79
Panjang Saluran Drainase/gorong-gorong yang direhabilitasi dan dipelihara dengan rutin (swakelola)	m	4000	11157	278.92

Pada indikator kinerja “Meningkatnya Jaringan Drainase di Kota Binjai” diperoleh persentase capaian sebesar 106,79%. Hal ini terjadi karena adanya tambahan dana yang tertampung pada P.APBD sehingga pembangunan drainase terbangun melebihi dari target perjanjian kinerja. Jika dibandingkan capaian pada 2015 sebesar 40.228 m, maka terjadi penurunan drainase yang dibangun ataupun direhab sebesar 10.418,53 m,hal ini disebabkan penurunan anggaran APBD 2016 untuk program drainase.

d. Sasaran : Meningkatnya Fungsi Sungai dengan Pembangunan Linning dan Bronjong

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian(%)
Pembangunan Linning dan Bronjong	m	1500	2286,2	152,41
Turap/talud/bronjong/saluran primer yang direhabilitasi dan dipelihara	m	6.532	5.232	80,09

Pada Indikator Kinerja Pembangunan Linning dan Bronjong persentase capaian sebesar 152,41%. Ini mempunyai arti telah terbangunnya Linning dan Bronjong sepanjang 2286,2 untuk pengamanan dinding sungai.mengingat Kota Binjai dialiri oleh 3 (tiga) sungai yaitu Sungai Bangkatan, Sungai Bingai, Sungai Mencirim.

Selama pelaksanaan Pembangunan Linning dan Bronjong ini Dinas Pekerjaan Umum telah berkoordinasi dengan UPT Sumber Daya Air dalam menangani pengamanan tebing sungai.

e. Sasaran : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Tentang Ke-Pu-an	Kegiatan	2	0	0
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana Kantor	Kegiatan	8	8	100

Pada Indikataor Kinerja Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Tentang Ke-PU-an tidak terlaksana dikarenakan kekurangan personil yang akan dikirim untuk pelatihan.

Pada Indikator meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana kantor persentase capaian 100% karena untuk mendukung kinerja aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai.

f. Sasaran : Meningkatkan Sarana Aparatur

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
Bangunan Gedung Kantor yang di bangun	Unit	14	12	85,71
Bangunan dan Gedung Kantor yang di rehabilitasi dan dipelihara dengan rutin (swakelola)	Unit	10	17	170

Pada Indikator bangunan gedung Kantor yang di bangun, persentase capaian hanya 85,71% dikarenakan 2 (dua) unit bangunan tidak terlaksana pembangunannya karena tidak ada cukup waktu dalam pelaksanaannya.

g. Sasaran : Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Infrastruktur

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
Pembangunan sarana Pelayanan Publik	Unit	17	12	70,59

Pada Indikator Kinerja Pembangunan sarana Pelayanan Publik capaian kinerja 70,59%,sarana pelayanan publik antara lain sarana air minum seperti pembuatan sumur bor. Satu unit sarana publik yang tidak terlaksana adalah pembangunan pajak tradisional modern di jalan Sibolga Kota Binjai dikarenakan tidak adanya kecukupan waktu dalam pelaksanaannya. Sedangkan capaian pada tahun 2015 sebanyak 6 unit yang terbangun.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Selama Tahun 2016 Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin di capai Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Binjai DPA Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 151.538.821.150,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 141.608.623.283,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 93,45% dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 9.930.197.867,-. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai Tahun 2016

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	Persentase Capaian(%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.046.934.100,00	812.074.186,00	78
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.571.281.000,00	12.419.349,00	80
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	99.856.000,00	87.867.100,00	88
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.000.000,00	14.750.000,00	37
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	112.500.000,00	22.267.800,00	20
6	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	52.337.125.000,00	48.894.985.300,00	93
7	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	38.787.683.000,00	37.585.599.300,00	97
8	Program Pembangunan Turap/talud/Bronjong	18.769.353.400,00	18.008.695.690,00	96
9	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4.827.805.450,00	4.749.420.200,00	98
10	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong	3.613.166.000,00	3.609.270.600,00	100
11	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	9.975.984.000,00	9.061.042.600,00	91
12	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase dan Gedung	6.357.133.200,00	6.343.301.100,00	100

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai pada Tahun 2016.

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai, dapat di simpulkan terdapat capaian kinerja yang efektif di beberapa program namun juga terdapat kurang efektifan di beberapa program lainnya terhadap capaian kinerja sasaran organisasi.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai Tahun 2016 merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) Pemerintah Kota Binjai untuk Tahun Anggaran 2016. Pembuatan LAKIP ini merupakan upaya untuk memenuhi amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan juga sebagai upaya tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana yang diharapkan semua pihak.

LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai Tahun 2016 menjadi gambaran penting terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai dan juga evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran sehingga dapat mencerminkan sejauh mana tingkat keberhasilan ataupun kegagalannya.

Dalam Tahun 2016 Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai menetapkan sebanyak 6 (enam) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sesuai dengan rencana kerja dan Dokumen Perjanjian kinerja Tahun 2015 yang ingin dicapai.

Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 75 atau interpretasi baik
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 116,45 atau interprestasi memuaskan
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 106.79 atau interprestasi memuaskan
- Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 152,41 atau interprestasi memuaskan
- Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 87,50 atau interprestasi baik
- Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 85,71 atau interprestasi baik
- Sasaran 7 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 70,59 atau interprestasi cukup baik

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 7 (enam) sasaran tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja terhadap program-program yang telah ditetapkan telah mencapai nilai rata – rata 99.21%, dimana hasil ini termasuk dalam kisaran > 85 – 100 yang menunjukkan interprestasi memuaskan. Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai dalam rangka mencapai target kinerjanya telah menganggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2016 yaitu sebesar Rp.151.538.821.151,-, sedangkan pada Akhir Tahun Anggaran tercatat bahwa realisasi anggaran telah mencapai Rp. 141.608.623.283,- atau serapan APBD telah mencapai 93,45% . Berdasarkan hal ini dapat dikatakan kondisi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai selama Tahun 2016 adalah Silpa Rp. 9.930.197.867,-.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diberikan beberapa rekomendasi untuk peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai di masa datang yaitu :

1. Program-program prioritas yang selaras dengan visi dan misi pemerintah Kota Binjai agar selalu menjadi fokus utama untuk ditampung dalam setiap penyusunan rencana kerja sehingga dapat tuntas untuk diselesaikan
2. Keakuratan laporan sangat tergantung dari validitas data hasil capaian program di setiap bidang yang menjalankan tugas dan fungsi pokok yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai.
3. Kekurangan waktu selama Tahun anggaran berjalan dalam menyelesaikan program kegiatan dapat disiasati dengan mempercepat proses pengadaan

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Binjai.

Binjai, Januari 2017
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KOTA BINJAI

Ir. ELVI KRISTINA SRI ULINA, M.Sc
NIP. 19641001 199003 2 005

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Organisasi : DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BINJAI			
2. Tugas : Melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Kota Binjai di Bidang Pekerjaan Umum			
3. Fungsi :			
1) Melaksanakan perumusan dan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum			
2) Menyusun program kegiatan operasional pelaksanaan pembangunan pengelolaan, peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum			
3) Menetapkan dan menyelenggarakan kegiatan dibidang Pekerjaan Umum			
4) Melaksanakan Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan Umum			
5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas dan fungsinya			
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	Meningkatnya sarana aparatur	Bangunan dan Gedung kantor yang dibangun	Lap. Bidang Cipta Karya
		Jumlah proyek DAK Air Minum dan Sanitasi yang dianggarkan biaya adminstrasinya	Lap. Bidang Cipta Karya
		Bangunan dan Gedung kantor yang rehabilitasi dan dipelihara dengan rutin (Swakelola)	Lap. Bidang Cipta Karya
2	Meningkatnya Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jalan yang di Hotmix	Lap.hasil survey Bidang Bina Marga
		Jembatan yang direhabilitasi dan di bangun	Lap.hasil survey Bidang Bina Marga
		Luas jalan yang terpelihara dengan rutin (swakelola)	Lap. Bidang Bina Marga
3	Meningkatnya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang Saluran Drainase/gorong-gorong yang dibangun	Lap. Bidang Cipta Karya
		Panjang Saluran Drainase/gorong-gorong yang direhabilitasi dan dipelihara dengan rutin (swakelola)	Lap. Bidang Cipta Karya
4	Meningkatnya Pembangunan turap/talud/brojong	Turap/talud/brojong yang dibangun	Lap. Bidang Pengairan
		Turap/talud/brojong/saluran primeryang direhabilitasi dan dipelihara	Lap. Bidang Pengairan

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA BINJAI

Ir. NANANG EKA SUMANTRI
PEMBINA TK I
NIP. 196902101995031004

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BINJAI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. NANANG EKA SUMANTRI

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BINJAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : H. M. IDAHAM, SH, M.Si

Jabatan : WALIKOTA BINJAI

Selaku atasan langsung pihak pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Binjai, Maret 2016

Pihak Kedua

WALIKOTA BINJAI

Pihak Pertama

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA BINJAI**

H. M. IDAHAM, SH, M.Si

**Ir. NANANG EKA SUMANTRI
PEMBINA
NIP. 196902101995031004**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA BINJAI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas sarana dan Prasarana Perkotaan di bidang :Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan	Merencanakan program dan kegiatan infrastruktur di Kota Binjai	8 Program
2	Meningkatnya Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pengaspalan Jalan Dengan Hotmix	52,747 M
		Pemeliharaan Jalan dengan rutin(swakelola)	3,000 M
		Pemeliharaan Jembatan dengan rutin(swakelola)	10 unit
3	Meningkatnya Jaringan Saluran Drainase di Kota Binjai	Meningkatnya Jaringan Drainase di Kota Binjai	27,915 M
		Panjang Saluran Drainase/gorong-gorong yang direhabilitasi dan dipelihara dengan rutin (swakelola)	4,000 M
4	Meningkatnya Fungsi Sungai dengan Pembangunan Linning dan Bronjong	Pembangunan Linning dan Bronjong	1,500 M
		Turap/talud/brojong/saluran primeryang direhabilitasi dan dipelihara	6,532 M
5	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Tentang Ke-Puan	3 Kegiatan
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Prasarana Kantor	7 Kegiatan
6	Meningkatnya sarana aparatur	Bangunan dan Gedung kantor yang dibangun	14 unit
		Bangunan dan Gedung kantor yang rehabilitasi dan dipelihara dengan rutin (Swakelola)	10 unit
7	Meningkatkan Pelayanan Publik di bidang Infarastruktur	Pembangunan sarana Pelayanan Publik	17 Unit

Program		Anggaran	Keterangan
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 950,934,100.00	
2	Program Peningkatana Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 34,846,281,000.00	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 99,856,000.00	
4	Program Peningkatana Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 40,000,000.00	
5	Program Peningkatana Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 251,642,850.00	
6	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp 51,987,125,000.00	
7	Program Pembangunan saluran Drainase/ Gorong-gorong	Rp 34,787,683,000.00	
8	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Rp 13,169,353,400.00	
9	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp 2,827,805,250.00	
10	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/ Bronjong	Rp 2,613,166,000.00	
11	Program Penembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp 17,476,020,000.00	
12	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase dan gedung	Rp 4,857,133,200.00	

Binjai, Maret 2016

WALIKOTA BINJAI

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA BINJAI

H. M. IDAHAM, SH, M.Si

Ir. NANANG EKA SUMANTRI
PEMBINA TK I
NIP. 196902101995031004